

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Ilmu Pengetahuan Sosial

a. Definisi Ilmu Pengetahuan Sosial

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu komponen dari mata pelajaran IPAS yang diajarkan di jenjang Sekolah Dasar dalam kurikulum merdeka. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022), anak-anak usia SD/MI/Program Paket A cenderung memahami sesuatu secara konkret atau apa adanya. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan juga mengalami berbagai transformasi. Banyak persoalan muncul yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal, sehingga diperlukan metode lintas disiplin untuk mendorong integrasi antara mata pelajaran IPA dan IPS menjadi satu kesatuan mata pelajaran yang disebut IPAS.

Gabungan dua bidang studi tersebut, khususnya IPS, mendorong peserta didik untuk memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap fenomena yang terjadi di sekeliling mereka. Toni (2018:6) menyatakan bahwa IPS adalah bidang studi yang berasal dari berbagai cabang ilmu sosial dan digunakan sebagai dasar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. IPS membahas hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks sosial, IPS tidak hanya mengkaji manusia pada masa sekarang, tetapi juga pada masa lalu dan masa mendatang.

Ilmu sosial merupakan bagian dari kajian IPS, meskipun tidak seluruh ruang lingkupnya memfokuskan pada perilaku manusia. IPS lebih mendalam dalam menelusuri berbagai persoalan sosial yang biasanya terjadi di lingkungan sekitar. Di Indonesia, disiplin ilmu yang dirangkum dalam IPS meliputi bidang ekonomi,

geografi, sejarah, politik, hukum, sosial, dan pendidikan kewarganegaraan. Dadang (2015:2) menyampaikan bahwa IPS merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap berbagai aspek kehidupan, baik secara fisik maupun sosial, yang nantinya akan mereka hadapi dalam kehidupan nyata.

b. Karakteristik Ilmu Pengetahuan Sosial

Indonesia telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, di mana mata pelajaran IPAS merupakan hasil integrasi antara Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). IPS sendiri memiliki kekhasan sebagai ilmu yang membahas kehidupan sosial manusia. Menurut Riska (2023: 4037), IPS memiliki beberapa ciri utama, yaitu: 1) merupakan kombinasi dari berbagai bidang seperti geografi, sejarah, ekonomi, hukum, politik, kewarganegaraan, sosiologi, pendidikan, dan agama; 2) kompetensi dasar IPS bersumber dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dirancang menjadi satu kesatuan materi; 3) pembelajaran IPS menyoroti permasalahan sosial dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner; 4) membahas peristiwa serta perubahan dalam kehidupan manusia; dan 5) menggunakan tiga dimensi untuk menganalisis dan memahami fenomena sosial secara menyeluruh.

Ahmad (2014: 10) juga menjelaskan bahwa karakteristik dari Ilmu Pengetahuan Sosial mencakup tiga aspek penting: pertama, pengembangan pola pikir peserta didik yang diarahkan untuk membentuk pribadi yang kreatif dan inovatif; kedua, penguatan nilai-nilai dan etika yang dianggap sebagai unsur utama dalam kehidupan; dan ketiga, penanaman rasa tanggung jawab serta keterlibatan sosial agar peserta didik dapat menjadi warga negara yang berperan aktif di masyarakat.

Salah satu tujuan pembelajaran IPS adalah membentuk warga negara yang mampu menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Nimas (2022: 13) IPS berfungsi untuk mengembangkan kemampuan siswa menjadi warga negara yang baik. Materi IPS biasanya diajarkan dengan pendekatan berbasis lingkungan sosial, dimulai dari lingkungan keluarga sebagai lingkup terdekat, lalu diperluas hingga ke sekolah dan masyarakat desa tempat siswa tinggal.

c. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial

Pentingnya pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di tingkat Sekolah Dasar tidak terlepas dari latar belakang siswa yang beragam. Anak-anak pada jenjang ini masih dalam tahap perkembangan awal dan belum memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik sosial secara mandiri. Peserta didik perlu dikenalkan dengan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar sebagai langkah awal membangun pemahaman sosial. Muhammad (2020:16) menyatakan bahwa pembelajaran IPS di Indonesia bertujuan agar peserta didik dapat memahami nilai-nilai luhur yang pernah, sedang, dan akan mereka alami dalam rangka membentuk pola hidup demokratis.

IPS diajarkan dengan maksud untuk mengasah pengetahuan, membentuk sikap positif, serta melatih keterampilan sosial guna menciptakan warga negara yang bertanggung jawab. Peserta didik diharapkan mampu berpikir logis dan kritis dalam menghadapi realitas kehidupan serta memiliki peran dalam melestarikan budaya bangsa. Era digital saat ini, arus informasi sangat cepat dan menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Lutfiatuz (2023:124) menekankan bahwa penting bagi siswa memahami IPS agar mereka mampu membedakan dan menyaring informasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Pendidikan karakter sangat dibutuhkan untuk menanggulangi perilaku menyimpang dan membentuk generasi yang unggul dan tangguh.

Mutikan dalam Sari (2020:122) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tujuan utama dari pengajaran IPS di sekolah, yaitu: pertama, menumbuhkan kesadaran terhadap warisan budaya dan sejarah bangsa; kedua, membekali peserta didik dengan ilmu sosial agar mereka dapat menerapkannya dalam menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat; ketiga, melatih kemampuan berpikir reflektif dan mengambil keputusan yang bijaksana; dan keempat, menumbuhkan empati sosial serta kemampuan menganalisis masalah dengan cara yang kritis. Tujuan-tujuan ini harus diupayakan agar dapat tercapai melalui kurikulum yang diterapkan secara konsisten di semua lembaga pendidikan, termasuk di tingkat Sekolah Dasar. Materi IPS untuk anak usia SD biasanya masih terbatas pada pengenalan gejala dan isu sosial yang ada di sekitar kehidupan mereka sehari-hari.

d. Manfaat dan Fungsi Ilmu Pengetahuan Sosial

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia diarahkan untuk membentuk masyarakat yang berkarakter positif dan berintegritas. Menurut Diana (2021: 21), UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) menetapkan bahwa pendidikan di abad ke-21 tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk kepribadian serta karakter peserta didik. Artinya, pendidikan tidak hanya menekankan aspek kognitif, melainkan juga menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Lingkungan sosial menjadi ruang yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dan membentuk individu yang mampu berinteraksi secara harmonis dalam masyarakat.

Asori (2018: 123) menjelaskan bahwa IPS memiliki sejumlah manfaat penting bagi peserta didik. Pertama, IPS membantu mencetak warga negara yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang masyarakat dan bangsanya, dengan sikap religius, jujur, demokratis, kreatif, serta memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis. IPS dapat menumbuhkan minat baca, semangat belajar, rasa ingin tahu, kepedulian terhadap lingkungan, serta kemampuan berkomunikasi dan berkontribusi secara produktif dalam kehidupan sosial dan budaya. Kedua, IPS mendorong siswa agar mampu berpikir tajam, mampu berkolaborasi, serta menanamkan nilai-nilai moral dan sikap positif. Ketiga, materi IPS berkaitan langsung dengan kehidupan sosial, menjadikannya sarana yang relevan untuk menghadapi tantangan masyarakat. Manfaat ini memperkuat peran IPS dalam mengembangkan kecakapan hidup serta sikap mental yang konstruktif bagi peserta didik.

Membekali peserta didik dengan pendidikan IPS memiliki dampak jangka panjang, baik bagi perkembangan individu maupun kemajuan bangsa secara keseluruhan. Intan (2024) menyebutkan bahwa tujuan pengajaran IPS di tingkat SD adalah untuk menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam mengolah informasi yang berkaitan dengan manusia dan lingkungannya secara lebih bermakna. Peserta didik diharapkan tumbuh menjadi individu yang peka terhadap persoalan sosial, bertanggung jawab, serta memiliki sikap toleran dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. IPS membantu peserta didik memahami berbagai persoalan sosial di sekeliling mereka dengan pendekatan yang sederhana namun bermakna, sehingga mampu membentuk fondasi karakter sejak dini.

2. Tiga Tradisi Ilmu Pengetahuan Sosial

a. Definisi Tiga Tradisi Ilmu Pengetahuan Sosial

Menurut Andriani (2023: 39) Pendidikan Sosial atau *Social Studies* merupakan hasil integrasi antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu humaniora yang diterapkan dalam konteks pembelajaran kewarganegaraan (*citizenship transmission*). Integrasi ini bertujuan membentuk peserta didik agar memiliki kesadaran diri serta tanggung jawab sosial, sehingga mampu berperilaku sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Dalam pendekatan IPS, terdapat beberapa tradisi keilmuan yang dimasukkan ke dalam dimensi pembelajaran untuk mendukung pencapaian tersebut.

Somantri (2001: 159) menekankan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan hasil dari proses penyaringan dan penyesuaian berbagai cabang ilmu sosial, yang dipadukan untuk menunjang pencapaian tujuan dari pembelajaran IPS. Melalui pembelajaran IPS yang mencakup tiga dimensi utamanya, peserta didik diarahkan untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik diharapkan mampu mengembangkan potensi diri sebagai individu yang berkontribusi pada pembangunan bangsa yang bermartabat.

Secara teoritis, terdapat keterkaitan erat antara Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan. Keduanya terhubung dalam satu kerangka tradisi pembelajaran, yaitu pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*), yang menjadi landasan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Melalui pendekatan ini, pola pikir dan kesadaran warga negara pada diri peserta didik dibentuk secara bertahap. Natawidjaja dalam Andriani (2008: 95) menyatakan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk kualitas kepribadian seseorang, serta turut membangun karakter bangsa yang berakar pada nilai-nilai

agama, pandangan filsafat, pendekatan psikologis, serta kebudayaan sosial.

b. Karakteristik Tiga Tradisi Ilmu Pengetahuan Sosial

Pendekatan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada dasarnya dirancang untuk mendorong keaktifan peserta didik dalam memahami lingkungan sosialnya. Ciri khas dari tiga dimensi dalam IPS bisa dikenali melalui beberapa karakteristik utama. Yulia (2023: 12) menyebutkan bahwa yang membedakan IPS dari mata pelajaran lain adalah: (1) adanya integrasi dari berbagai disiplin ilmu seperti geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi; (2) landasan kompetensi dasarnya bersumber dari struktur ilmu-ilmu tersebut; (3) fokus pada dinamika kehidupan sosial dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya; serta (4) penggunaan tiga pendekatan utama untuk memahami fenomena sosial dan kehidupan manusia secara menyeluruh.

Tujuan utama dari ketiga pendekatan IPS adalah membekali peserta didik agar mampu mengenali serta menyikapi realitas sosial di lingkungan terdekat mereka seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Berbeda dari sudut pandang tersebut, Dufty dalam Ida (2017: 25) menjelaskan bahwa IPS memiliki ciri sebagai suatu ilmu sistematis yang mempelajari hubungan antarmanusia. Ilmu sosial harus dapat diuji kebenarannya secara ilmiah, dibangun berdasarkan teori dan konsep yang dikembangkan melalui penelitian yang sah. Pengetahuan ini tidak hanya menyajikan data, tetapi juga membentuk kesimpulan yang relevan tentang nilai-nilai, kenyataan sosial, dan perkembangan ilmu itu sendiri.

Ketiga pendekatan ini IPS sangat penting untuk dikenalkan sejak dini karena peserta didik berasal dari latar belakang sosial yang beragam. Yulia (2023: 8) menyatakan bahwa sekolah memiliki peran

penting dalam menyaring dan mengembangkan informasi dari luar lingkungan belajar menjadi pembelajaran yang lebih bermakna, terutama karena peserta didik pada jenjang ini belum memiliki kemampuan sepenuhnya untuk memahami kompleksitas persoalan sosial. IPS yang mengusung tiga tradisi utama mampu memperluas wawasan, membentuk sikap kritis, melatih keterampilan sosial, serta meningkatkan sensitivitas peserta didik terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

c. **Macam-macam Tradisi Ilmu Pengetahuan Sosial**

Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia senantiasa mengalami penyesuaian guna menjawab tuntutan perkembangan zaman. Kajian yang dilakukan oleh Barr, Barth, dan Shermis menunjukkan bahwa setiap cabang dari ilmu sosial memiliki karakteristik tersendiri dan idealnya dipelajari secara terpisah. Gagasan awal ini kemudian berkembang, mendorong pergeseran paradigma dari konsep “Social Studies” menjadi “Social Sciences,” di mana pembelajaran disusun berdasarkan pemisahan disiplin ilmu yang lebih jelas. Barr, Barth, dan Shermis sebagaimana dikutip oleh Dadang (2015: 6) menyusun tiga pendekatan utama dalam pendidikan ilmu sosial, yakni: pertama, *Social Studies sebagai Pewarisan Nilai Kewarganegaraan (Citizenship Transmission)*; kedua, *Social Studies sebagai Ilmu Sosial (Social Science)*; dan ketiga, *Social Studies sebagai Proses Refleksi dan Penyelidikan Kritis (Reflective Inquiry)*.

Najwa (2024: 507) juga menjelaskan bahwa ketiga pendekatan tersebut menjadi fondasi penting dalam metode pembelajaran IPS. Pendekatan pertama, *Citizenship Transmission*, mengedepankan pembentukan perilaku, pemahaman, dan sikap warga negara yang ideal. Pendekatan kedua, *Social Science*, menitikberatkan pada pengembangan kemampuan berpikir ilmiah

dan pemahaman atas konsep-konsep sosial. Sementara pendekatan ketiga, *Reflective Inquiry*, diarahkan pada penguatan kemampuan berpikir kritis dan investigatif peserta didik, menyerupai cara kerja ilmuwan sosial dalam memecahkan masalah.

IPS memiliki keterkaitan yang erat dengan Pendidikan Kewarganegaraan dan berfungsi sebagai wadah strategis untuk menanamkan semangat kebangsaan. Salah satu bentuk aplikasinya adalah dengan mengedepankan nilai-nilai karakter, etika berbangsa, dan kesadaran kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan yang dipadukan dalam tradisi *Citizenship Transmission* menjadi elemen penting dalam mencetak generasi muda yang memahami dan menghayati identitas kebangsaannya. Barr, Barth, dan Shermis sebagaimana dikutip dalam Muh. Sholeh (2023: 202) menyatakan bahwa salah satu tradisi terpenting dalam IPS adalah *Social Studies* sebagai sarana pewarisan nilai kewarganegaraan yang menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan sangat relevan untuk diperkuat di sekolah, guna memastikan peserta didik mampu melanjutkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan bernegara secara bertanggung jawab.

3. *Citizenship Transmission*

a. Definisi *Citizenship Transmission*

Citizenship Transmission dikenal sebagai pendekatan paling awal dalam tradisi *social studies*, dengan tujuan utama untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan kepada generasi muda. Tradisi ini menjadi fondasi dari Pendidikan Kewarganegaraan, karena melalui pendekatan inilah nilai, norma, dan etika kehidupan berbangsa diturunkan kepada peserta didik. Rudi (2020: 71) menyatakan bahwa inti dari *citizenship transmission* adalah menciptakan warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum yang dianut dalam suatu masyarakat. Dalam hal

ini, peserta didik memegang peran penting sebagai pewaris nilai-nilai luhur kebangsaan tersebut.

Era global yang terus berubah dengan cepat, generasi muda dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari derasnya arus informasi hingga perubahan pola hidup masyarakat dunia. Andriani (2023: 83) menegaskan bahwa peserta didik harus dibekali dengan pengetahuan yang tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga diyakini kebenarannya secara pribadi (*self-evident truth*). Peran guru menjadi penting, yaitu menyampaikan materi yang relevan dan bermakna agar peserta didik mampu menyerap nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan realitas sosial.

Agar proses *citizenship transmission* berjalan dengan efektif, guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Ketika metode penyampaian guru bersifat monoton atau kurang menarik, maka peserta didik cenderung pasif dan nilai-nilai kewarganegaraan sulit diserap dengan baik. Andriani (2023: 80) menyebutkan bahwa pendekatan dalam pembelajaran perlu terus disempurnakan agar mampu mendorong peserta didik menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan sadar akan perannya dalam masyarakat.

Menurut Tono (2023: 83), *citizenship transmission* adalah strategi dalam pendidikan IPS yang fokus pada pelestarian dan penyampaian nilai-nilai dasar kehidupan bernegara. Melalui proses ini, peserta didik dibimbing agar memiliki pedoman moral dan etika dalam bertindak. Kenyataannya, penerapan nilai-nilai tersebut tidak selalu berjalan mulus karena seringkali peserta didik terpengaruh oleh dinamika lingkungan di sekitarnya. Pentingnya menanamkan pemahaman yang mendalam mengenai makna dan pentingnya nilai-nilai kewarganegaraan sejak dini sangat berpengaruh pada karakter peserta didik.

Lebih lanjut, Suryadi dan Somardi dalam Andriani (2023: 37) menjelaskan bahwa sistem kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan fondasi utama dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendekatan ini kini telah dikembangkan dalam kerangka yang lebih modern, dengan mencakup tiga aspek utama, yaitu: *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan dalam kehidupan bernegara), dan *civic disposition* (karakter dan kepribadian warga negara). Ketiganya berperan penting dalam membentuk peserta didik menjadi individu yang tidak hanya paham aturan, tetapi juga mampu bertindak bijak dalam kehidupan sosial.

b. Tujuan *Citizenship Transmission*

Ranah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), atau biasa disebut pendekatan *citizenship transmission* berfungsi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai dasar kewarganegaraan. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui metode pengajaran yang mengangkat kisah-kisah penuh makna dari budaya lokal serta warisan nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat. Menurut Dea et al. (2024: 55), *citizenship transmission* dipandang sebagai proses pembentukan nilai-nilai ideal kemanusiaan, dimana peserta didik diarahkan untuk menerima serta menginternalisasi pandangan, sikap, keyakinan, dan perilaku tertentu yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Kepribadian seseorang mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan sosialnya. Peserta didik perlu dibekali dengan nilai-nilai positif agar dapat tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nastiti (2020) menekankan bahwa elemen penting dalam pendidikan nilai adalah kemampuan peserta didik untuk mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan secara kritis dan reflektif, termasuk dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik atau persoalan yang muncul di antara teman-temannya.

Pendekatan IPS yang menitikberatkan pada *citizenship transmission* tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial dan kebangsaan secara mendalam.

Najwa et al. (2024: 507) menegaskan bahwa *citizenship transmission* bertujuan membentuk pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai kehidupan berbangsa, serta menanamkan sikap dan perilaku yang sesuai dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ini meliputi penguatan nilai-nilai moral, spiritual, kebangsaan, ideologis, serta keagamaan dalam diri peserta didik. Penting bagi proses pendidikan untuk terus menjaga kesinambungan pewarisan nilai-nilai tersebut agar tetap relevan dengan norma dan budaya yang berlaku, sekaligus mampu menjawab tantangan sosial masa kini.

c. Manfaat dan Fungsi *Chitizenship Transmission*

Pembentukan karakter warga negara yang baik menjadi landasan utama dalam penerapan pendekatan *citizenship transmission* dalam pembelajaran IPS. Agar nilai-nilai kewarganegaraan dapat tertanam secara efektif, diperlukan strategi yang terencana dan terfokus. Toni (2023: 84) menyampaikan bahwa melalui pendekatan ini, siswa diarahkan untuk: (1) memahami dan menghayati berbagai nilai penting dalam kehidupan bernegara; (2) terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang membangun; (3) menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sosial; (4) menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau berpartisipasi dalam bela negara; serta (5) menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Seluruh tujuan tersebut dimaksudkan agar peserta didik menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata.

Penguatan nilai-nilai kewarganegaraan juga merupakan fondasi penting dalam upaya peningkatan mutu generasi penerus bangsa. Hamidi (2024: 204) menekankan bahwa fungsi utama

citizenship transmission adalah untuk membentuk perilaku peserta didik agar mampu berperan sebagai individu yang memahami hak, kewajiban, serta norma dalam masyarakat. Ini mencakup aspek moral, kognitif, dan perspektif sosial yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari pendekatan ini tidak hanya terletak pada pemahaman teori, tetapi juga pada praktik langsung dalam kehidupan sosial sebagai wujud nyata dari pembelajaran kewarganegaraan yang bermakna.

4. *Civic Disposition* (Karakter Privat dan Karakter Publik)

a. Definisi *Civic Disposition* (Karakter Privat dan Karakter Publik)

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, terdiri dari tiga unsur utama yang harus dikuasai oleh peserta didik, yakni pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai karakter kewarganegaraan. Ahmadin (2023: 1848) menekankan bahwa dari ketiga aspek tersebut, sikap atau *civic disposition* merupakan elemen yang paling mendalam dan penting. Tanpa adanya integrasi antara pemahaman dan tindakan nyata, maka pengetahuan itu sendiri menjadi kurang berarti.

Fenomena melemahnya karakter mulia di tengah masyarakat saat ini tidak dapat diabaikan. Pengaruh buruk dari lingkungan, termasuk dari orang-orang terdekat, bisa menjadi pemicu utama. Finanda (2024: 392) menyampaikan bahwa *civic disposition* adalah fondasi penting yang wajib dimiliki setiap warga negara agar mereka dapat membangun keterampilan dan pemahaman tentang kewarganegaraan, baik dalam hal sikap, moral, maupun etika. Nilai-nilai ini dibutuhkan agar peserta didik mampu menghadapi arus informasi dan pengaruh global yang negatif dengan lebih tangguh.

Dini (2020: 236) menambahkan bahwa *civic disposition* mencerminkan kompetensi sikap kewarganegaraan yang meliputi

toleransi, solidaritas, penghormatan terhadap keragaman, dan kepekaan sosial terhadap berbagai permasalahan publik. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin adalah pondasi utama yang diperlukan untuk membentuk warga negara yang unggul dan berintegritas. Secara umum, *civic disposition* dapat dimaknai sebagai bentuk karakter kewarganegaraan.

Karakter sendiri merupakan bagian dari struktur kepribadian manusia. Kamus Sosiologi mengartikan bahwa karakter dipandang sebagai identitas utama dari kepribadian seseorang. Khobli (2022: 116) mengungkapkan bahwa istilah seperti karakter, watak, kepribadian, dan individu seringkali sulit dibedakan karena keempatnya merujuk pada inti sifat yang membentuk individu secara utuh. Watak terdiri dari beberapa unsur utama, yakni sikap, kebiasaan perilaku, dan temperamen. Semua ini merupakan bagian dari komposisi kepribadian seseorang.

Pentingnya karakter yang baik bukan hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan sosial. Latipa (2022: 508) menguraikan bahwa *civic disposition* menumbuhkan rasa peduli terhadap hak dan kesejahteraan sesama, menjunjung tinggi prinsip keadilan tanpa membedakan, peka terhadap kondisi sekitar, serta mengedepankan sikap saling menghargai dan bertanggung jawab. Seluruh nilai tersebut berkontribusi dalam membentuk identitas sosial yang kuat dalam diri individu.

Zhou dalam Ika (2024: 86) menegaskan bahwa *civic disposition* mengandung dua pilar penting: karakter privat dan karakter publik. Kedua aspek ini saling melengkapi dan dibutuhkan untuk menciptakan pribadi yang seimbang: mampu menjaga integritas diri sekaligus aktif dalam kehidupan sosial. Sejalan dengan Charistia (2020: 19) merujuk pada konsep *civic disposition* yang

diperkenalkan oleh Margaret Branson pada tahun 1998, yang terdiri atas dua jenis karakter, yaitu karakter privat dan karakter publik.

Karakter privat merujuk pada kualitas personal seseorang seperti kesadaran diri, tanggung jawab, disiplin, serta rasa hormat terhadap orang lain. Karakter publik menggambarkan bagaimana individu bertindak sebagai bagian dari komunitas, termasuk dalam hal bekerja sama, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mengambil peran dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan berbagai sumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *civic disposition* memiliki peran fundamental dalam pembentukan karakter peserta didik. Titik (2021: 24) mengutip definisi dari Pusat Bahasa Depdiknas bahwa karakter mencakup elemen-elemen seperti hati nurani, jiwa, moral, kepribadian, serta perilaku yang terbentuk melalui proses internalisasi nilai-nilai. Karakter dapat berubah dan berkembang seiring waktu, sementara watak lebih bersifat bawaan dan menjadi ciri khas individu. Kementerian Pendidikan Nasional pun menyatakan bahwa karakter adalah gabungan dari moralitas, budi pekerti, dan nilai-nilai kehidupan yang dijadikan pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak secara etis dan bertanggung jawab.

b. Indikator *Civic Disposition* (Karakter Privat dan Karakter Publik)

Civic disposition dapat diartikan sebagai sikap dan sifat yang seyogianya dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat sebagai wujud dari tanggung jawab kewarganegaraannya. Karakter yang baik dalam diri seseorang berperan besar dalam memperkuat keberlangsungan sistem demokrasi. Halimah dalam Finanda (2024: 392) mengungkapkan bahwa *civic disposition* mencakup indikator karakter positif seperti kesopanan, rasa tanggung jawab pribadi,

disiplin, kepedulian terhadap sesama, keterbukaan berpikir, sikap kompromis, penghargaan terhadap keberagaman, keteguhan hati, serta komitmen terhadap nilai dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat.

Aspek karakter privat dan publik ini saling melengkapi dan dibutuhkan untuk menciptakan pribadi yang seimbang, mampu menjaga integritas diri sekaligus aktif dalam kehidupan sosial. Charistia (2020: 19) merujuk pada konsep *civic disposition* yang diperkenalkan oleh Margaret Branson pada tahun 1998, yang terdiri atas dua jenis karakter, yaitu karakter privat dan karakter publik:

Karakter privat mencakup aspek seperti moralitas, pengendalian diri, dan penghargaan terhadap nilai kemanusiaan individu. Karakter publik meliputi kepedulian sosial, sopan santun, ketaatan terhadap aturan, kemampuan berpikir kritis, serta keterbukaan dalam berdiskusi dan berkompromi.

Banyak peserta didik yang terjebak dalam pengaruh lingkungan yang kurang baik karena minimnya kesadaran akan dampak dari perbuatannya. Kurangnya kontrol diri ini dapat menimbulkan berbagai perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini agar peserta didik tumbuh dengan kesadaran penuh terhadap konsekuensi dari setiap tindakan mereka.

Seluruh karakter itu merupakan syarat utama agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan harmonis. Sejalan dengan Frican (2022: 440) menegaskan bahwa *civic disposition* mengembangkan karakter privat seperti rasa tanggung jawab, kedisiplinan, serta penghargaan terhadap hak dan martabat sesama manusia. Karakter publik mencakup kepedulian sosial, kesantunan, kepatuhan terhadap aturan, kemampuan berpikir secara kritis, serta keterbukaan dalam berdialog, berunding, dan mencapai kompromi

bersama. Peran pendidik baik guru maupun orang tua, sangat dibutuhkan untuk memberikan arahan yang baik.

Karakter privat pada tanggung jawab memiliki beberapa indikator Reni (2021:3) Peserta didik sudah dikatakan tanggung jawab apabila sudah memperlihatkan indikator tanggung jawab yaitu: (1) mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik, (2) bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan, (3) menggunakan waktu secara efektif, (4) dan mengerjakan tugas kelompok dengan diskusi. Selanjutnya indikator kedisiplinan menurut Akmaluddin (2019: 3) keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh siswa disekolah, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap siswa sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Karakter privat yang terakhir penghargaan setiap individu meliputi beberapa indikator menurut Monica (2023:2) penghargaan kita terhadap harkat dan martabat orang lain atau benda selain diri kita sendiri.

Karakter publik pada kepedulian meliputi beberapa indikator, Hardati dalam Amalia (2023: 6) peduli kepada kesulitan yang dialami orang lain, peka dengan kerusakan lingkungan fisik, peka dengan perilaku menyimpang, peka dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, serta peka kepada perubahan pola kehidupan sosial. Indikator penghargaan setiap individu menurut Keraf dalam Ria (2024: 3) memberi penghargaan atau menghormati orang yang diajak bicara, khususnya pendengar atau pembaca. Indikator mengindahkan aturan main menurut Natassya (2023: 3) memahami aturan-aturan dan patuh terhadap aturan-aturan.

Karakter publik pada berpikir kritis memiliki beberapa indikator menurut Nurhakim (2020:1) memberikan umpan balik dari suatu pemikiran atau teorema yang kita terima. Indikator kemauan untuk mendengar menurut Sani dalam Asrul (20:114) mendengar pendapat orang lain dengan seksama, memahami

perspektif yang berbeda, memberikan tanggapan yang membangun. Terakhir indikator dari bernegosiasi dan berkompromi menurut Rahayu dalam Nurmayanti (2023: 6) mau bekerja sama dengan baik.

Kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh kesadarannya sendiri. Aulia (2023: 18) membedakan pengaruh pembentukan karakter menjadi dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebiasaan, pengalaman, dan motivasi dari dalam diri, sedangkan faktor eksternal mencakup keluarga, lingkungan sosial, institusi pendidikan, dan masyarakat luas. Pengaruh lingkungan seringkali tidak disadari membentuk watak seseorang, karena perilaku yang berulang kali dilihat atau dialami dapat menimbulkan kecenderungan untuk menirunya, baik itu positif maupun negatif.

Faktor penting lainnya dalam pembentukan karakter adalah pendidikan. Furqan (2010: 15) menjelaskan bahwa rendahnya mutu pendidikan karakter di Indonesia disebabkan oleh dua hal utama. Pertama, sistem pendidikan yang lebih fokus pada aspek kognitif dan pengembangan intelektual, tanpa menyeimbangkan pembentukan nilai moral dan karakter. Kedua, lingkungan sekitar yang belum sepenuhnya mendukung terbentuknya karakter positif. Faktor-faktor ini bisa muncul baik dari pendidikan formal seperti sekolah, maupun pendidikan nonformal seperti pesantren, kursus, dan lembaga bimbingan lainnya.

c. **Tujuan *Civic Disposition* (Karakter Privat dan Karakter Publik)**

Watak kewarganegaraan merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter individu yang berperan aktif dalam membangun bangsa. Karakter ini mencakup dua ranah utama, yaitu karakter publik dan karakter privat. Perilaku individu tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari proses pembelajaran dan

pengaruh lingkungan sejak dini—baik dari keluarga, pendidikan formal di sekolah, maupun dari masyarakat. *Civic disposition* atau watak kewarganegaraan menjadi pilar utama dalam menjaga serta memperkuat sistem demokrasi yang berdasarkan konstitusi.

Heni (2022: 24) menyatakan bahwa kemampuan untuk merefleksikan diri secara kritis, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah bagian dari tujuan *civic disposition*. Ketika individu menyadari adanya perilaku yang menyimpang dari nilai tersebut, muncullah motivasi internal untuk memperbaiki diri. Kesadaran ini perlu diimbangi dengan penguatan dua aspek utama, yaitu penguasaan pengetahuan dan keterampilan sosial.

Pandangan serupa disampaikan oleh Jonah (2024: 224), yang menyebut bahwa *civic disposition* dalam diri generasi muda penting untuk dipupuk demi mencetak individu yang tidak hanya berkarakter kuat, tetapi juga mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Nilai-nilai luhur yang diinternalisasikan, seperti kemandirian, rasa tanggung jawab, sikap toleran, partisipatif, dan semangat demokrasi, menjadi modal utama untuk membentuk warga negara yang aktif dan peduli terhadap komunitasnya. Perilaku positif ini nantinya akan sangat berperan dalam menentukan arah dan keberhasilan sistem sosial di tengah masyarakat. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, karakter kewarganegaraan dapat tumbuh dan mengakar dalam diri generasi penerus bangsa.

d. Manfaat dan Fungsi *Civic Disposition* (Karakter Privat dan Karakter Publik)

Civic disposition atau watak kewarganegaraan dalam dunia pendidikan tidak hanya sekadar bertujuan meningkatkan pengetahuanpeserta didik, melainkan juga memainkan peran krusial dalam proses pembentukan kepribadian dan moral. Pengembangan karakter ini bisa diwujudkan melalui berbagai kegiatan sekolah yang bersifat rutin maupun kontekstual, seperti kegiatan penguatan pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Menurut Latipa (2022: 508), karakter kewarganegaraan berfungsi sebagai indikator dalam menilai kualitas moral individu. Ketika peserta didik memahami dan mempraktikkan nilai-nilai luhur bangsa, maka mereka secara tidak langsung berkontribusi dalam membentuk identitas nasional yang kuat dan harmonis. Pendidikan karakter tidak bisa dipisahkan dari upaya membangun masyarakat yang sehat secara sosial dan budaya.

Menurut Nurlita (2023: 37), watak kewarganegaraan menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian dan sikap sosial individu. Salah satu nilai yang menonjol dalam hal ini adalah disiplin, yang mencerminkan kesanggupan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan norma dan aturan sosial. Watak seperti tanggung jawab dan komitmen terhadap kepentingan bersama menjadi ciri dari individu yang mampu berkontribusi positif dalam kehidupan bernegara. Institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai tersebut, tidak hanya melalu

pengajaran formal, tetapi juga lewat teladan dan pembiasaan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Peserta didik dapat tumbuh sebagai pribadi yang berintegritas dan siap menjalankan peran sebagai warga negara yang baik.

5. Proses Pembelajaran

a. Definisi Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran dapat dipahami sebagai kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan memahami bagaimana kegiatan belajar berlangsung. Menurut Nanang (2023: 22), proses pembelajaran mencerminkan suatu pandangan teoritis yang luas mengenai bagaimana pembelajaran terjadi secara menyeluruh. Pandangan ini dapat menjadi dasar atau referensi dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dan efektif. Pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua jenis utama: pendekatan yang berfokus pada peserta didik (*student-centered approach*) dan pendekatan yang berfokus pada guru (*teacher-centered approach*).

Peserta didik menjadi pusat utama dari pendekatan seluruh aktivitas belajar. Pendekatan ini mengutamakan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, mendorong mereka untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri. Pendekatan yang berorientasi pada guru menempatkan pendidik sebagai tokoh sentral yang menyampaikan materi secara langsung dan sistematis. Meskipun peserta didik memiliki peran yang lebih pasif, pendekatan ini tetap memiliki keunggulan dalam penyampaian informasi yang terstruktur. Keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta didik dalam proses belajar.

Siti (2020: 1418) menyatakan bahwa pembelajaran adalah aktivitas komunikasi antara guru dan peserta didik yang bertujuan untuk saling bertukar informasi. Guru tetap memainkan peran

penting sebagai fasilitator dalam setiap tahap proses belajar. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Eko (2023: 148), yang menyatakan bahwa proses pembelajaran adalah bentuk interaksi antara peserta didik dan pendidik yang nantinya akan dievaluasi untuk mengukur keberhasilan hasil belajar.

Meskipun saling berkaitan, istilah “pembelajaran” dan “belajar” memiliki perbedaan dalam makna. Dina (2023) mengutip teori belajar dari Bruner, yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses aktif di mana seseorang memperoleh pemahaman atau pengetahuan yang baru dan lebih dalam. Terdapat tiga tahapan kognitif penting dalam proses pembelajaran: pertama, tahap menerima atau mengakses informasi baru; kedua, tahap mengolah atau mentransformasikan informasi tersebut; dan ketiga, tahap mengevaluasi relevansi dan keakuratan dari pengetahuan yang telah diperoleh.

b. Tujuan Proses Pembelajaran

Tujuan dari sebuah proses pembelajaran dapat dipahami sebagai sasaran utama yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan belajar, yang mencakup hasil pengetahuan dan perilaku yang terbentuk pada peserta didik. Menurut Pramudita (2023: 410), tujuan pembelajaran mencakup pengembangan sikap dan wawasan peserta didik, termasuk dalam pengelolaan waktu serta konsentrasi terhadap kemampuan yang sedang diasah. Sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka, yang menekankan bahwa proses belajar harus dirancang sedemikian rupa agar menjadi pengalaman yang menyenangkan dan memotivasi peserta didik untuk mengenali serta mengembangkan potensi dan minat mereka secara maksimal.

Safrur (2023: 124) menyampaikan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya berorientasi pada hasil akademis, tetapi juga mencerminkan perkembangan menyeluruh yang sesuai dengan

kebutuhan pribadi peserta didik dan konteks sosialnya. Ini berarti bahwa keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh bagaimana proses tersebut mampu menjawab kebutuhan riil siswa dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pencapaian nilai semata.

Rika (2020: 23) menambahkan bahwa peserta didik adalah individu yang berada dalam fase pertumbuhan dan pembentukan jati diri melalui pembelajaran. Peserta didik berhak mendapatkan pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan dasar mereka, baik dari sisi sarana pendidikan maupun dari sisi perhatian serta dukungan emosional yang diberikan oleh guru. Apabila kebutuhan tersebut terpenuhi dengan baik, maka proses belajar akan berlangsung lebih optimal dan menghasilkan perubahan positif yang signifikan dalam diri peserta didik.

c. Tahapan Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui tiga tahapan mendasar yang saling berhubungan dan menentukan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan. Tahapan tersebut meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) evaluasi pembelajaran. Masing-masing tahapan memiliki peranan yang krusial dalam menciptakan proses belajar yang efektif dan bermakna. Langkah pertama adalah perencanaan pembelajaran, yaitu proses awal yang merancang segala kebutuhan dan strategi pengajaran agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Buhari (2023: 5) menekankan bahwa tanpa adanya perencanaan yang matang dan terstruktur, jalannya pembelajaran bisa mengalami hambatan bahkan gagal mencapai sasaran. Perencanaan ini meliputi penentuan tujuan belajar, pemilihan materi, metode, hingga penilaian yang akan digunakan.

Selaras dengan pandangan tersebut, Farida (2019: 8) menyebutkan bahwa perencanaan adalah kegiatan berpikir secara

sistematis dan terorganisir untuk menyusun langkah-langkah pengajaran. Melalui perencanaan, pendidik dapat menentukan arah, pendekatan, dan hasil belajar yang diinginkan, sehingga proses mengajar tidak hanya berjalan lancar tetapi juga efektif.

Setelah rencana disusun, masuk ke tahap kedua yakni pelaksanaan pembelajaran. Di sinilah strategi dan materi yang telah disiapkan diimplementasikan di dalam kelas. Eko (2023: 148) menyatakan bahwa pelaksanaan merupakan bentuk nyata dari perencanaan, artinya pelaksanaan adalah pengejawantahan dari rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Kualitas pelaksanaan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh ketelitian dalam tahap perencanaannya.

Tahap terakhir adalah evaluasi pembelajaran, yang berfungsi untuk menilai sejauh mana pembelajaran telah mencapai target yang ditentukan. Menurut Eko (2023: 153), evaluasi bukan hanya soal mengukur hasil belajar, tetapi juga menilai efektivitas metode dan strategi yang digunakan. Evaluasi ini harus dilakukan secara terus-menerus dan menyeluruh, agar perkembangan peserta didik dapat dipantau secara objektif dan berkelanjutan.

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian Wina (2023) yang berjudul "*School Culture Habitual As A Strengthening Of Civic Disposition Of Students At Kutabima 01 Of Elementary School, Cimanggu District, Cilacap Regency*" menyimpulkan bahwa rutinitas yang diterapkan dalam budaya sekolah dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat disposisi kewarganegaraan peserta didik. Dalam praktiknya, kebiasaan-kebiasaan positif yang berlangsung setiap hari di lingkungan sekolah, seperti tata krama, kerjasama, dan kepatuhan terhadap aturan, secara konsisten membentuk karakter siswa yang

- berintegritas. Guru berperan dalam mengarahkan pembiasaan ini sebagai strategi pendidikan karakter dalam bingkai civic disposition.
2. Chesa (2023) dalam penelitiannya bertajuk *“Fostering Civic Dispositions In The Digital Era 4.0 Through Local Wisdom-Based Civic Education”* menyoroti pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang berpijak pada nilai-nilai lokal dalam membentuk karakter warga negara di era digital. Kearifan lokal digunakan sebagai basis materi dan pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan sikap kewarganegaraan generasi muda. Pengetahuan lokal ini menjadi jembatan antara tradisi dan tantangan global, sehingga menciptakan warga negara yang berkarakter kuat dan siap menghadapi dinamika zaman.
 3. Dalam studi Nabillah (2022) berjudul *“Analisis Pembelajaran Tematik terhadap Pengembangan Civic Disposition Siswa Kelas V Gugus Sekolah II Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan”*, ditemukan bahwa pendekatan pembelajaran tematik berkontribusi pada penguatan nilai-nilai karakter kewarganegaraan. Hasilnya, siswa menunjukkan peningkatan sikap tanggung jawab, kedisiplinan, serta penghormatan terhadap martabat individu. Pembelajaran tematik memungkinkan integrasi nilai-nilai sosial dalam proses belajar, yang tanpa disadari turut membentuk disposisi kewarganegaraan melalui efek pengiring dari kegiatan belajar mengajar yang dirancang guru.
 4. Liliana (2023) melalui penelitiannya *“Analisa Efektivitas Pentingnya Pendidikan Pancasila dalam Membangun Civic Disposition Murid dalam Konteks Kurikulum Merdeka Pada Siswa UPT SDN 19 Tanjung Harapan”* menegaskan bahwa penguatan karakter siswa melalui Pendidikan Pancasila sangat terasa manfaatnya. Siswa menjadi lebih menghargai sesama, menunjukkan kecintaan terhadap tanah air, serta mampu menunjukkan perilaku positif seperti menjaga lingkungan sekolah dan menghormati

perbedaan pendapat. Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih besar bagi pendidikan karakter, khususnya dalam aspek civic disposition yang dibangun melalui pembelajaran kontekstual.

5. Ikhtiati (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "*Implementasi Keterampilan Pemecahan Masalah Matematis dalam Peningkatan Civic Dispositions Siswa*" menemukan adanya kaitan antara kemampuan berpikir logis dalam matematika dengan sikap kewarganegaraan siswa. Ketika siswa dibimbing dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dan kritis, mereka belajar bersikap objektif, sabar, dan jujur dalam mengambil keputusan. Proses tersebut membentuk karakter yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap musyawarah. Artinya, pelajaran matematika tak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tapi juga memperkuat nilai-nilai karakter.

C. Kerangka Pikir

Fenomena yang terjadi di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 6 Batur Banjarnegara, menunjukkan adanya berbagai permasalahan yang kurang sesuai dengan *civic disposition* (karakter privat dan karakter publik). Permasalahan terfokuskan saat proses pembelajaran berlangsung yang menjadi salah satu penyebab keributan dan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa peserta didik yang berperilaku kurang sesuai dengan nilai kewarganegaraan.

Permasalahan tidak hanya saat jam pelajaran, namun juga saat istirahat berlangsung. Ada beberapa peserta didik yang ditemukan berkelahi karna tidak diawasi oleh guru saat jam istirahat. Munculnya perilaku dalam berbicara dan bertindak sering kali membuat temannya merasa tersinggung. Kejadian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa karakter peserta didik yang belum sesuai dengan *civic disposition*.

Pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus menggunakan strategi yang efektif. Menjadikan peserta didik yang memiliki watak baik memerlukan proses yang panjang. Penerapan atau strategi yang harus guru ajarkan kepada peserta didik juga harus sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar, serta mudah dipahami oleh peserta didik.

★ Penelitian ini berfokus pada proses pembelajaran di kelas mengenai *civic disposition* (karakter privat dan karakter publik) yang dimiliki peserta didik kelas IV SD Negeri 6 Batur Banjarnegara. Analisis *civic disposition* peserta didik guna mengetahui sejauh mana *civic disposition* (karakter privat dan karakter publik) sudah tertanam pada peserta didik beserta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi karakter peserta didik. Penelitian berharap dapat membantu peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan menganalisis *civic disposition* (karakter privat dan karakter publik) beserta faktor pendukung dan penghambat pada setiap peserta didik.

Gambar Alur Pikir sebagai berikut :

Gambar 2.1 Alur Pikir

